

**PENDIDIKAN ISLAM DAN KERUKUNAN
(SEBUAH REFLEKSI TERHADAP KONFLIK ANTAR PEMELUK
AGAMA DI INDONESIA)**

Moch. Sony Fauzi

Dosen Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

Abstract

Education is a process of individual continuously learning and adaptation to the cultural values and social ideals. Education is a comprehensive process including all the aspects of life to prepare them to be able to face all the challenges.

Considering the definition, we will see how dominant the aspects of human life style management in order to be in accordance with the universe are. An education process is expected to produce tolerance, egalitarianism, and skills to actualize one's self in the constellation of human life dynamics. It is also expected to produce peace and harmony as a part of ideal community with the educated people as the members. It means that the education process is considered failed if it produces totalitarian cannibalism that can easily arouse conflicts among people. Therefore, the writer hopes that the understanding of an ideal Islamic education that is accommodative to the values of plurality and brotherhood among people will emerge. Finally, the values can be the source of aspiration in rearranging the religious concept of this nation to regain the peace that has once been disappeared because of the conflict among the religious communities, through education.

Keywords: education, brotherhood

A. Pendahuluan

Adalah masalah yang krusial saat ini, di seluruh belahan dunia, "Bagaimana menata hubungan yang dialogis antar pemeluk umat beragama?". Urgensitas masalah ini tampaknya menunjang pengangkatan isu pluralitas oleh pemikiran postmodernisme sehingga isu pluralitas seolah-olah tampak begitu sangat aktual.

Indonesia adalah salah satu dari sebagian dari komunitas dunia yang saat ini berupaya keras untuk mengupayakan hal ini. Upaya ini sebagai respon terhadap kenyataan bangsa yang dulu dikenal santun dan religius ini beberapa waktu yang lalu berubah beringas dan mudah melakukan tindak kekerasan pada sesama dan antar pemeluk agama, berbagai analisis pun muncul dalam mencari faktor penyebab pertikaian, Apakah ini karena faktor keagamaan, etnisitas, ekonomi dan politik atau faktor lain. Fungsi agama pun menjadi bahan perdebatan antar pakar, apakah agama menjadi pemicu konflik atau agama berfungsi sebagai faktor integrasi sosial (Agama sebagai salah satu aspek pluralitas manusia, disinyalir secara potensial punya kontribusi dalam menyulut api kekerasan).

Kenyataan ini tentu akan berimplikasi pada sebuah pertanyaan tentang bagaimanakah transformasi ajaran-ajaran agama tersebut dilakukan, dengan kata lain bagaimanakah proses pendidikan agama tersebut berlangsung. Amin Abdullah – dalam sebuah kuliah tamu di STAIN (sekarang UIIS Malang) – mengatakan bahwa pengajaran klasik pendidikan agama baru memuat aspek , *To know*, *To do*, dan *To be*, akan tetapi belum memuat aspek *To live together*.

Maka reformulasi pendidikan agama barangkali memberikan sebuah ruang sebagai sebuah alternatif pemecahan masalah friksi antar umat beragama di Indonesia, sehingga pada akhirnya pendidikan agama akan tercerahkan serta melahirkan sikap-sikap egaliter dan inklusif serta tidak menempatkan pemeluk agama lain sebagai musuh atau penduduk neraka yang selalu harus diperangi.

B. Agama dan Kerukunan

Agama secara primordial sebenarnya merupakan sistem nilai yang memberikan aturan-aturan bagi manusia untuk berkehidupan secara lebih baik, sesuai dengan keinginan Tuhan sebagai pencipta kehidupan itu sendiri. Idealitas semua agama barangkali akan bermuara di sini. Agama Islam sendiri punya beberapa jargon yang dimunculkan seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri, seperti Islam sebagai *rahmah lil 'Aalamiin*, Islam sebagai penyempurna budi pekerti manusia (*Makaarimal Akhlaaq*),

Islam sebagai rekonsiliator dengan terminologi *kalimatun sawaaun*-nya dan lain sebagainya.

Agama hadir untuk memberikan kerukunan dan perdamaian antar sesama akan tetapi kehadiran agama tidak untuk melahirkan pertikaian dan permusuhan di alam semesta ini. Walaupun ada teks-teks agama yang melegitimasi “kekerasan”, maka bagaimana meletakkan term kekerasan itu sebagai alternatif terakhir dan kalau bisa tidak menjadi alternatif sama sekali dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan.

Akan tetapi akhir-akhir ini agama justru disinyalir menjadi akar terjadinya konflik-konflik yang merebak akhir-akhir ini. Arifin Assegaf (Th. Sumartana, 2001: 34) menyebutkan bahwa ada 4 Faktor yang menyebabkan konflik antar pemeluk agama:

1. Eksklusivitas dari sementara pemimpin dan penganut agama
2. Sikap tertutup dan saling curiga antaragama
3. Agama yang tujuannya berubah menjadi alat, realitas menjadi sekedar kebijaksanaan.
4. Kondisi Politik, Sosial dan Ekonomi

Abdul Munir Munir Mul Khan dalam kata pengantarnya dalam buku yang sama berusaha menyimpulkan bahwa ada faktor yang bersifat internal dan ada yang eksternal. (Th. Sumartana, 2001). Bersifat internal dalam kaitan keterbatasan pemahaman agama, salah menafsirkan konsep-konsep agama ataupun sifat eksklusivitas pemeluk agama. Dan Eksternal dalam kaitan sistem yang melingkupi perikaian itu (Ibid; hal 01).

Bahkan pasca runtuhnya WTC dan bobolnya Pentagon (11 September 2001), isu Terorisme seakan mampu menghegemoni image masyarakat tentang pluralisme agama, isu ini seakan-akan mampu menempatkan posisi antar agama menjadi saling berhadapan, paling tidak antara Islam dan Yahudi serta Islam dan Nasrani. Dan memang inilah realitas yang ada, dan agama lagi-lagi harus rela dianggap sebagai akar konflik dengan berbagai justifikasi yang mungkin sangat *interpretable*.

Sebuah hipotesis barangkali bisa dihadirkan dalam merenungkan masalah ini, apakah agama telah gagal mengemban misi perdamaian dan kerukunan di tengah-tengah hiruk pikuknya dinamika kehidupan manusia yang seperti sekarang ini. Dan tantangan bagi kita adalah bagaimana mereformulasi kembali pemahaman agama kita, sebuah pemahaman agama yang dilandasi oleh kesadaran akan adanya multikulturalisme dan pluralisme dan akan melahirkan kerukunan dan perdamaian di antara umat manusia. Dan tentu pemahaman agama yang dimaksud di sini adalah sebuah pemahaman agama yang kokoh dan dibangun dengan keyakinan yang kuat sehingga kedap dari pengaruh kepentingan hedonis manusia baik secara politis ataupun ekonomis.

C. Pendidikan Islam: Antara Pluralitas dan Kerukunan

Pendidikan, kata yang dilekatkan kepada Islam, telah didefinisikan secara berbeda-beda oleh orang-orang yang berlainan sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Tetapi semua pendapat itu bertemu dalam pandangan, bahwa “Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien”.

Inilah yang kelihatannya merupakan pandangan yang kebanyakan dipegang oleh para ahli pendidikan terkemuka sepanjang zaman. John Stuart Mill, misalnya mengemukakan : *Not only does education include whatever we do our selves and whatever is done for us by others for the express purpose of bringing us nearer to the perfection of our nature; it does more in its largest acceptance; it comprehends even the indirect efforts produced on a character, and on the human faculties by things of which the direct purpose are quite different.* John Milton, ahli pendidikan lain mengatakan: *I call a complete and generous education that which fits a man to perform justly, skillfully, and magnanimously all affairs, both private and public, of peace and war* (Azra, 1998: 4).

Sedangkan John Dewey tokoh pendidikan terkemuka, menyatakan, bahwa pendidikan adalah “...proses pembentukan kecakapan fundamental, secara intelektual dan emosional, ke arah alam sesama manusia” (Ahmad, 1958:9).

Dari pandangan beberapa ahli pendidikan di atas, jelaslah bahwa pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat. Pendidikan merupakan proses yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan untuk mempersiapkan mereka agar mampu mengatasi segala tantangan.

Mohammad Natsir mengatakan bahwa pendidikan ialah satu pimpinan jasmani dan rohani yang menuju kepada kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya” (Natsir, 1954).

Kalau kita kaji dari uraian tentang definisi pendidikan di atas kita akan melihat betapa dalam pendidikan aspek penataan pola hidup manusia agar selaras dengan kehidupan alam semesta (kehidupan masyarakat sekitar) begitu dominan, sebuah proses pendidikan diharapkan mampu melahirkan sikap-sikap yang toleran, egaliter dan senantiasa mengaktualisasi diri dalam percaturan dinamika kehidupan manusia. Diharapkan juga dalam proses pendidikan itu lahir sebuah perdamaian dan kerukunan sebagai bagian dari komunitas ideal yang ditempati manusia-manusia yang terdidik, ini berarti sebuah proses pendidikan itu akan gagal apabila justru melahirkan kanibalisme yang totaliter, yang rentan terhadap terjadinya konflik antar sesama manusia.

Kata-kata Islam yang dihubungkan dengan kata “pendidikan”, tentu menimbulkan pengertian-pengertian baru disamping menjelaskan pula perbedaan-perbedaan yang menjadi karakteristik tertentu dari “pendidikan Islam”. Dr. Yusuf al Qardhawi memberi pengertian “pendidikan Islam” sebagai berikut: Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya; akhlak dan ketrampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup, baik dalam keadaan perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya (Al-Qardhawi, 1980 :39 terj. A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad).

Pengertian ini memperlihatkan perbedaan pendidikan umum dengan pendidikan Islam. Perbedaan lebih jelas dapat dilihat jika kita kembali kepada salah satu pengertian pendidikan (umum) yakni bahwa ia adalah proses pemindahan nilai-nilai budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Perbedaan itu adalah menyangkut nilai-nilai yang dipindahkan. Dalam pendidikan Islam nilai-nilai yang dipindahkan itu berasal dari sumber-sumber nilai Islam yakni Al Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Namun perbedaan ini ternyata tidak secara radikal membedakan sekali antara pendidikan Islam dan pendidikan itu sendiri karena pada realitasnya, konsep-konsep Quran dan Sunnah serta Ijtihad itu juga mengakomodir nilai-nilai yang lahir dari perkembangan budaya kehidupan manusia, kalau Islam punya jargon *rahmatan lil 'Alamiin* maka dinamika yang terjadi di alam semesta ini semestinya juga mendapat ruang dalam mereformulasi nilai-nilai Islam tersebut.

Sebuah kenyataan yang harus disadari dalam mereformulasi pendidikan Islam adalah pluralitas kehidupan manusia, Manusia hidup di alam yang penuh dengan kemajemukan dan keanekaragaman budaya termasuk agama. Pilihan dalam reformulasi itu adalah bukan merombak kemajemukan itu untuk tunduk dalam satu konsep ideologi yang harus di anut bersama, namun pilihan terbaik bagi reformulasi itu adalah bagaimana menawarkan konsep teologi yang berwawasan sosial yang melahirkan kedamaian di tengah kemajemukan dan keberagaman itu.

Masalah isu pluralisme memang saat ini dengan menggunakan media cetak dan elektronik, serta berbagai alat komunikasi yang canggih, pemikiran posmodernisme berhasil mengangkat isu itu ke permukaan dengan daya dobrak dan daya pikat yang luar biasa. Seolah-olah isu pluralitas memang sama sekali baru dan hanya baru-baru ini saja diangkat ke permukaan oleh umat manusia. Padahal permasalahan dan persoalan pluralitas sesungguhnya telah dibicarakan oleh para pemikir sejak dahulu kala. Falsafah Yunani telah membicarakan hal tersebut secara konseptual, dengan aneka ragam solusi yang dikemukakan. Solusi yang ditawarkan oleh permenides berbeda dengan solusi yang disuguhkan oleh Heraklitos; begitu juga solusi Plato berbeda dengan solusi yang diberikan oleh Aristoteles (Abdullah, 2000: 68).

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu dihadapkan pada berbagai fenomena pluralitas. Pluralitas warna kulit (kulit putih, hitam, kuning, sawo matang, dan sebagainya), pluralitas etnik (Tionghoa, Arab, Jawa, Sunda, Bugis, Banjar, Bali, Minang, Batak, dan sebagainya); pluralitas

agama (Kristen-Katolik, Kristen-Protestan, Islam, Hindu, Budha, dan sebagainya); pluralitas bahasa (Inggris, Prancis, Jerman, Indonesia, Mandarin, Jepang, belum lagi bahasa daerah). Di Indonesia saja ada beberapa puluh bahasa (daerah); pluralitas latar belakang pendidikan (SD, SMP, SMU, pesantren, kejuruan, pendidikan tinggi), dan belum lagi jika dikaitkan dengan pendidikan spesialis seperti kedokteran, kehutanan, farmasi, pendidikan agama, kemiliteran, hukum, dan seni (lukis, pahat, suara, panggung dan sebagainya).

Daftar "pluralitas" dapat diperpanjang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan kita. yang ingin ditekankan disini adalah isu pluralitas disini bukanlah barang baru. Membicarakan persoalan pluralitas sekarang ini adalah *"to put a new wine in the old bottle"* (memasukkan minuman anggur yang baru dalam botol yang lama). Botolnya tetap itu juga – dalam arti bahwa isu pluralitas adalah setua usia manusia dan selamanya akan ada – hanya saja cara membuat minuman anggur akan bisa terus menerus berubah, sesuai dengan perkembangan metodologi pembuatan minuman yang ada (Abdullah: 2000, 69).

Karena kenyataan inilah maka perbedaan agama adalah sesuatu hal yang sangat wajar, maka kewajaran ini harus disadari benar antar pemeluk agama, dan masing-masing harus berusaha menemukan benang merah dari sisi konsep agama masing-masing yang mengajarkan pesan-pesan universal seperti kedamaian, kerukunan, cintas kasih antar sesama dan sebagainya. Sebuah pesan Rasulullah SAW yang sangat monumental masih tertulis jelas dalam khasanah keilmuan Islam, ketika beliau akan mendirikan sebuah komunitas yang sangat modern di zamannya yaitu Masyarakat Madinah, *"Wahai manusia, sebarkan salam, hubungkan tali persaudaraan, berilah makan, berilah makan dan shalatlah di tengah malam ketika manusia sedang asyik tidur niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat dan sejahtera"*.
(HR. Turmudzi)

Inilah sebenarnya nilai-nilai Islam yang seharusnya ditransformasikan dalam proses pendidikan Islam di tengah pluralitas kehidupan manusia dan kerukunan menjadi tuntutan yang harus diwujudkan untuk membentuk masyarakat yang rukun dalam perbedaan dan berbeda dalam kerukunan.

D. Pendidikan Agama Inklusif di Daerah Rawan Konflik

Pendidikan agama harus dikembangkan guna menghasilkan insan yang tahu menghargai perbedaan, peka akan nilai-nilai kemanusiaan universal serta mau berdialog dengan pemeluk agama yang lain. Agama sebagaimana uraian yang panjang lebar di atas ternyata kaya sekali dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, martabat setiap manusia bersumber dari fakta keterciptaan itu, sedikitpun tidak bergantung pada etnis dan agama. Martabat itu harus dihormati begitu saja, oleh siapa saja, tanpa syarat sebagai sesuatu yang inheren dan inviolable. Kewajiban manusia dan negara hanya mengakui martabat yang tidak dapat diganggu gugat itu dan melindunginya dari berbagai pelanggaran.

Untuk membebaskan murid dari perangkap sekat-sekat primordial, pendidikan agama inklusif adalah sebuah alternatif yang cocok dengan sifat majemuk masyarakat Indonesia. Di sekolah, pelajaran agama harus lebih menekankan nilai-nilai pluralisme dan kebersamaan. Dengan metode dialogis dan tidak indoktrinatif, murid diajak berefleksi atas realitas kemajemukan dan menggali nilai-nilai spiritualitas sosial. Dengan sendirinya, tidak tepat bila pendidikan agama di sekolah mengedepankan nilai-nilai eksklusif yang mengeksklusifkan orang lain (Karman, Kompas, 2006).

Djoko Saryono (Jawa Pos, 2006) menawarkan ide dalam membentuk sebuah proses pembelajaran yang didasari semangat multikulturalisme dan Pluralisme maka diperlukan kegemaran melakukan perantauan budaya (*cultural passing over*), pemahaman lintas budaya (*cross cultural understanding*) dan pembelajaran lintas budaya (*learning a cross culture*) Hal ini akan membantu penemuan formulasi pendidikan agama di daerah rawan konflik dari materi pelajaran yang menegaskan eksklusivitas menuju ajaran-ajaran yang bernuansa inklusif. Murid dibiasakan pertanyaan “Bagaimana menjadi sesama bagi orang lain?” bukan selalu bertanya-tanya “Siapakah sesamaku ?” (berdasarkan agama atau etnis). Dalam hal ini kitab suci dan tradisi religius kaya dalam memberikan motivasi bagaimana hidup sebagai sesama dan menjadi sesama bagi orang lain. Dengan paradigma inklusif itu, pendidikan agama di wilayah konflik akan menolong anak melepaskan diri dari memori kolektif yang bermusuhan.

Di era otonomi pendidikan, pemda di wilayah konflik harus berinisiatif menyusun kurikulum pendidikan agama yang relevan dengan kondisi sosial yang rawan konflik. Secara isi, kurikulum itu harus digagas dalam kerangka inklusivisme oleh guru-guru agama yang berpengalaman dan berwawasan kebangsaan. Unsur lain yang perlu ada adalah kearifan lokal. Setiap adat dan etnis sebenarnya memiliki mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Itu perlu digali dan dipadukan dengan ajaran agama, supaya resolusi konflik juga diinspirasi dari struktur sosial masyarakat itu sendiri dan pembelajaran agama akan mendarah daging (Karman, Kompas, 2005).

Namun, betapa pun baiknya sebuah buku pegangan pendidikan agama, guru tetap faktor kunci yang paling menentukan. Guru agama hadir dan berperan disekolah sebagai agen rekonsiliasi. Di tangan guru yang kreatif, pelajaran agama yang terbatas akan dapat dimanfaatkan untuk hasil maksimal. Guru, misalnya, dapat memasukkan proyek *live in individual* maupun kolektif untuk mempraktikkan kebersamaan lintas suku, agama, dan strata sosial. Dengan langsung hidup dalam komunitas majemuk, murid belajar melihat kemanusiaan dalam diri orang lain secara manusiawi lepas dari identifikasi etnis dan agama.

Tugas guru agama di wilayah konflik dapat digambarkan secara negatif dan positif. Secara negatif, salah satu tugas guru agama adalah membersihkan murid dari memori kolektif yang negatif itu. Untuk itu guru agama harus kreatif dalam menerjemahkan bahan pelajaran agar pembusukan kolektif dalam alam sadar murid tidak berlanjut. sebagai guru ia tidak boleh terpancing memberi komentar pribadi yang menguatkan stigma negatif untuk salah satu kelompok bertikai. Secara eksplisit maupun implisit, guru tidak boleh mencela, lebih-lebih lagi menyatakan keberpihakan pada salah satu kelompok. Ia harus menjadi figur rekonsiliasi. Dan mereka harus selalu terlibat dalam berbagai dialog antar tokoh agama di wilayah konflik dan tentu bersama pemerintah.

Secara normatif, guru agama membekali generasi muda dengan kesadaran kolektif yang positif berdasarkan nilai-nilai kasih dan penghargaan pada hukum positif. Daripada memandang teman di sekolah sebagai patut dicurigai, anak mulai dengan cara pandang baru. Keadilan dibicarakan di kelas dari perspektif hukum masyarakat beradab, bukan hukum rimba.

Dibicarakan makna penghargaan terhadap harta benda milik orang lain termasuk musuh. Dibicarakan juga praktik mengasihi musuh secara konkret, yakni tidak berbuat sesuatu yang merugikan secara sewenang-wenang. Kalau bisa, musuh yang haus diberi minum.

Hanya dengan begitu, memori kolektif yang mengandung kecurigaan dan permusuhan mengalami transformasi. Murid menghayati spiritualitas menjadi sesama yang pada gilirannya mampu mematahkan potensi rantai kekerasan kolektif. Tragedi pertikaian tinggal menjadisejarah masa lampau dan tidak hidup terus dalam kesadaran generasi muda. Akan muncul generasi baru yang *mindset*-nya baru dan bersahabat dengan perbedaan. Dengan demikian, konflik antar-etnis di Kalbar yang sampai berusia tiga dekade tidak akan terulang di Ambon atau di Poso, dan tidak pula di daerah lain (Karman, Kompas, 2005).

F. Penutup

Berbagai uraian di atas, mengarahkan kita semua pada sebuah pemahaman bahwa pendidikan Islam yang ideal sangat akomodatif terhadap nilai-nilai Pluralitas dan persaudaraan antar sesama manusia. Dan nilai-nilai ini bisa menjadi sumber inspirasi dalam menata kembali konstruk pemikiran keagamaan bangsa ini, untuk meraih kembali simpul-simpul kedamaian yang sempat hilang diterpa badai kerusuhan antar umat beragama melalui pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Abdulah, Amin, *Dinamika Islam Kultural*, Mizan, Bandung, 2000.

Ahmad, Khursid, *Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam*, Terjemahan M. Hashem, Bandung, 1958.

Azra, Azyumardi, *Esei-Esei Intelektual Muslim Dan Pendidikan Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1995.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Pendidikan Islam Dan Madrasah Hasan Al-Banna*, Terjemahan Bustani A. Gani Dan Zainal Abidin Ahmad, Bulan Bintang, Jakarta, 1980.

Hasan, Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Al-Maarif, Bandung, 1980.

Koran Kompas Edisi 18 Agustus 2002

Koran Jawa Pos Edisi 14 Oktober 2002

Muhaimin, *Dakwah di tengah Transformasi Sosial*, Karya Abditama, Surabaya, 2000

Natsir, Mohammad, *Capita Selecta*, Gravenhage, Bandung, 1954.

Sumartana, Th, *Pluralisme, Konflik Dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Interfidei, Yogyakarta, 2001.